

## **PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD PG) KABUPATEN SAMPANG**

Nugrahini Susantinah Wisnujati  
[wisnujatinugrahini@uwks.ac.id](mailto:wisnujatinugrahini@uwks.ac.id)  
 Dosen pada Program Studi Agribisnis  
 Fakultas Pertanian  
 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dengan judul Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Sampang adalah: Untuk menyediakan panduan, arahan serta acuan SKPD, DPRD, Perguruan Tinggi/Litbang, Organisasi Non Pemerintah, Institusi Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Kabupaten Sampang.

Metode yang Penelitian ini dilaksanakan dengan metode Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Sampang sebagai dokumen penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Sampang dalam pembangunan pangan dan gizi yang bersifat terpadu (*integrated*), bertahap dan berkesinambungan (*Sustainable*), serta terukur keberhasilannya (*measurable*).

Hasil Penelitian Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Sampang yaitu : Ketersediaan pangan nabati 3 (tiga) yang tertinggi adalah: padi, ubi kayu, dan jagung, Ketersediaan pangan hewani meliputi: ikan, daging, dan telur. Tingkat konsumsi energi penduduk Kabupaten Sampang tahun 2015 sebesar 1.878 kkal/kapita/hari, masih di bawah standar Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 kkal/kapita/hari. Tingkat konsumsi protein penduduk Kabupaten Sampang tahun 2015 sebesar 50,8 gram/kapita/hari, masih di bawah standar kecukupan konsumsi protein yang dianjurkan yaitu sebesar 52 gram/kapita/hari. Persentase penduduk rawan pangan di Kabupaten Sampang masih tinggi, pada tahun 2013 jumlah penduduk rawan pangan sebesar 50,19% dan jumlah penduduk sangat rawan pangan sebesar 11,98%. Skor PPH Kabupaten Sampang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 cenderung mengalami kenaikan yaitu berturut-turut sebesar 66,1; 72,9; 79,6; dan 86,4. Namun demikian, angka capaian skor PPH tersebut masih di bawah target MDG's yaitu sebesar 95.

**Kata kunci : Konsumsi, MDG's, Pangan.**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Pembangunan pangan dan gizi adalah sebuah investasi strategis yang akan memberikan dampak dalam jangka panjang bagi peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia. Pengaruh pangan dan gizi begitu signifikan

sehingga pemerintah menetapkan program percepatan pangan dan gizi utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan (Perpres No. 42 Tahun 2013).

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi rakyat Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam kehidupan dinamika sosial politik. Hal tersebut akan menjadi sangat penting bagi Kabupaten Sampang untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi suatu daerah, rumah tangga dan individu yang berbasiskan kemandirian pangan.

Berdasarkan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) yang dipublikasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama *World Food Program* (WFP) Tahun 2015, semua kecamatan di Kabupaten Sampang merupakan kecamatan prioritas rendah (prioritas 5), artinya sudah tergolong kecamatan yang cenderung tahan pangan. Namun demikian penting untuk diketahui bahwa tidak semua rumah tangga di kecamatan prioritas rendah tersebut tergolong tahan pangan.

Solusi terkait penanganan kerawanan pangan dan gizi di Kabupaten Sampang sebenarnya telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi. Banyak kemajuan telah dicapai dalam pembangunan pangan dan gizi yang meliputi perbaikan gizi masyarakat, aksesibilitas pangan, mutu dan keamanan pangan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan koordinasi dalam kelembagaan pangan dan gizi.

Keterkaitan pembangunan pangan, kesehatan dan gizi dengan penanggulangan kemiskinan, pendidikan, pemberdayaan keluarga dan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan masyarakat perlu diperjelas sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengalokasikan kegiatan-kegiatan prioritas yang saling menunjang sekaligus memberi arah pembangunan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Sampang secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif apabila memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu, terukur keberhasilannya dan berkesinambungan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2015-2019, demikian pula untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2015-2019, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh daerah. Oleh karena itu perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Sampang sebagai penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Sampang dalam pembangunan pangan dan gizi yang bersifat terpadu (*integrated*), bertahap dan berkesinambungan (*sustainability*), serta terukur keberhasilannya (*measureable*), yang berisi panduan dan arahan serta acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi bagi Institusi Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perguruan tinggi/litbang, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan stakeholder lain.

### **Permasalahan**

Permasalahan yang perlu dikaji dalam kegiatan Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Sampang Tahun 2016 adalah :

- 1) Meningkatnya kasus gizi buruk di Kabupaten Sampang
- 2) Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengakses ketersediaan pangan yang dipengaruhi oleh kemampuan daya beli karena tingkat pendapatan dan kemiskinan seseorang
- 3) Banyak ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi syarat dari tahun ke tahun karena penggunaan bahan tambahan pangan yaitu pemanis dan pengawet yang berlebih
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
- 5) Terbatasnya kelembagaan pangan

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dilakukan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Sampang adalah: Untuk menyediakan panduan, arahan serta acuan SKPD, DPRD, Perguruan Tinggi/Litbang, Organisasi Non Pemerintah, Institusi Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Kabupaten Sampang.

Sedangkan tujuan dilakukan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Sampang adalah:

- 1) Meningkatkan pemahaman seluruh *stakeholders* terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk pemantapan ketahanan pangan dan perbaikan gizi;
- 2) Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah;
- 3) Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi secara terpadu.

### **Sasaran**

Sasaran yang diharapkan dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Sampang ini adalah:

- 1) Terwujudnya kondisi ketersediaan pangan yang mantap secara mandiri berbasis sumber daya lokal;
- 2) Terwujudnya kemudahan dan kemampuan mengakses pangan bagi setiap rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten Sampang seiring menurunnya prevalensi penduduk rawan pangan;
- 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang
- 4) Terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat;
- 5) Meningkatnya status gizi masyarakat.

## METODOLOGI

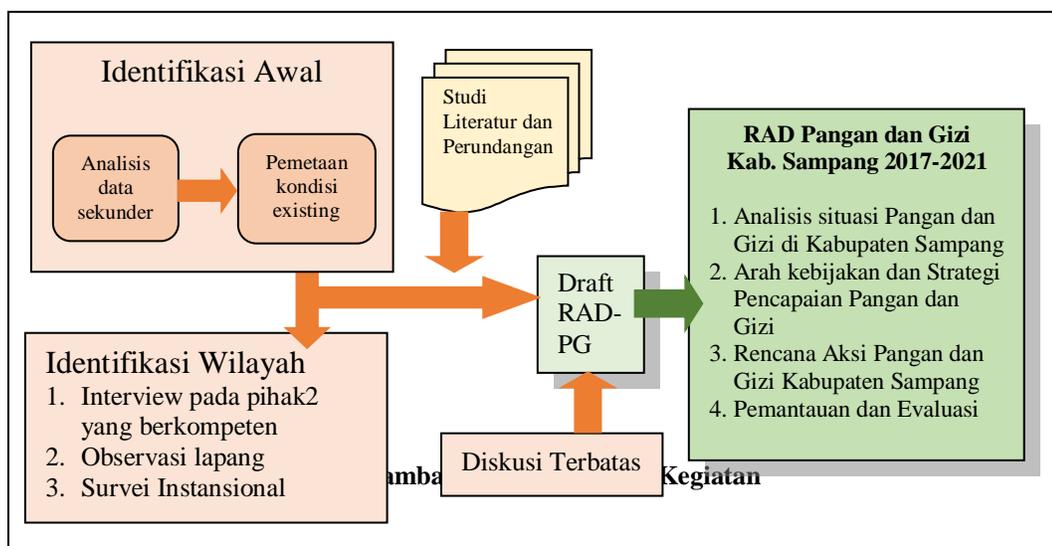
Kajian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Sampang dan dilakukan selama 3,5 bulan. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Sampang sebagai dokumen penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Sampang dalam pembangunan pangan dan gizi yang bersifat terpadu (*integrated*), bertahap dan berkesinambungan (*Sustainable*), serta terukur keberhasilannya (*measurable*).

### Ruang Lingkup

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi disusun melalui pendekatan **5 (lima) pilar** pembangunan pangan dan gizi yang meliputi: (1) **Perbaikan gizi masyarakat**, terutama pada ibu pra-hamil, ibu hamil, dan anak melalui peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan berkelanjutan difokuskan pada intervensi gizi efektif pada ibu pra-hamil, ibu hamil, dan anak balita; (2) **Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam** melalui peningkatan ketersediaan dan akses pangan yang difokuskan pada keluarga rawan pangan dan miskin; (3) **Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan** melalui peningkatan pengawasan keamanan pangan yang difokuskan pada makanan jajanan yang memenuhi syarat dan produk industri rumah tangga (PIRT) tersertifikasi; (4) **Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)** melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peran pimpinan formal serta non formal, terutama dalam perubahan perilaku atau budaya konsumsi pangan yang difokuskan pada penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, perilaku hidup bersih dan sehat, serta merevitalisasi posyandu; dan (5) **Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi** melalui penguatan kelembagaan pangan dan gizi di tingkat kabupaten sampai tingkat desa.

### Tahapan Kegiatan

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Sampang dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan dan metodologi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Situasi Pangan dan Gizi di Kabupaten Sampang**

Upaya pemantapan ketahanan pangan dan gizi, yang sampai saat ini masih menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Sampang, menghadapi berbagai masalah yang harus dipecahkan. Masalah tersebut meliputi: (1) perbaikan gizi masyarakat; (2) aksesibilitas pangan yang beragam; (3) pengawasan mutu dan keamanan pangan; (4) perilaku hidup bersih dan sehat; dan (5) kelembagaan pangan dan gizi.

Adapun permasalahan khusus dari masalah utama tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: prevalensi jumlah balita sangat pendek sebesar 12%, sedangkan yang pendek sebesar 22%; jumlah BBLR yang cenderung semakin meningkat; tingkat konsumsi energi sebesar 1.878 kkal/kapita/hari masih di bawah AKE sebesar 2.000 kkal/kapita/hari; tingkat konsumsi protein sebesar 50,8 gram/kapita/hari masih di bawah standar sebesar 52 gram/kapita/hari; hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sampang masuk kategori rawan pangan; masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan beracun atau berbahaya bagi kesehatan; proporsi rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menurut data tahun 2014 di Kabupaten Sampang adalah sebesar 29,8%, terpaud banyak dengan capaian provinsi Jatim (47,21%) dan Nasional (48,7%), serta Masih berada di bawah angka harapan (di atas 50%); dan kinerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang yang belum optimal.

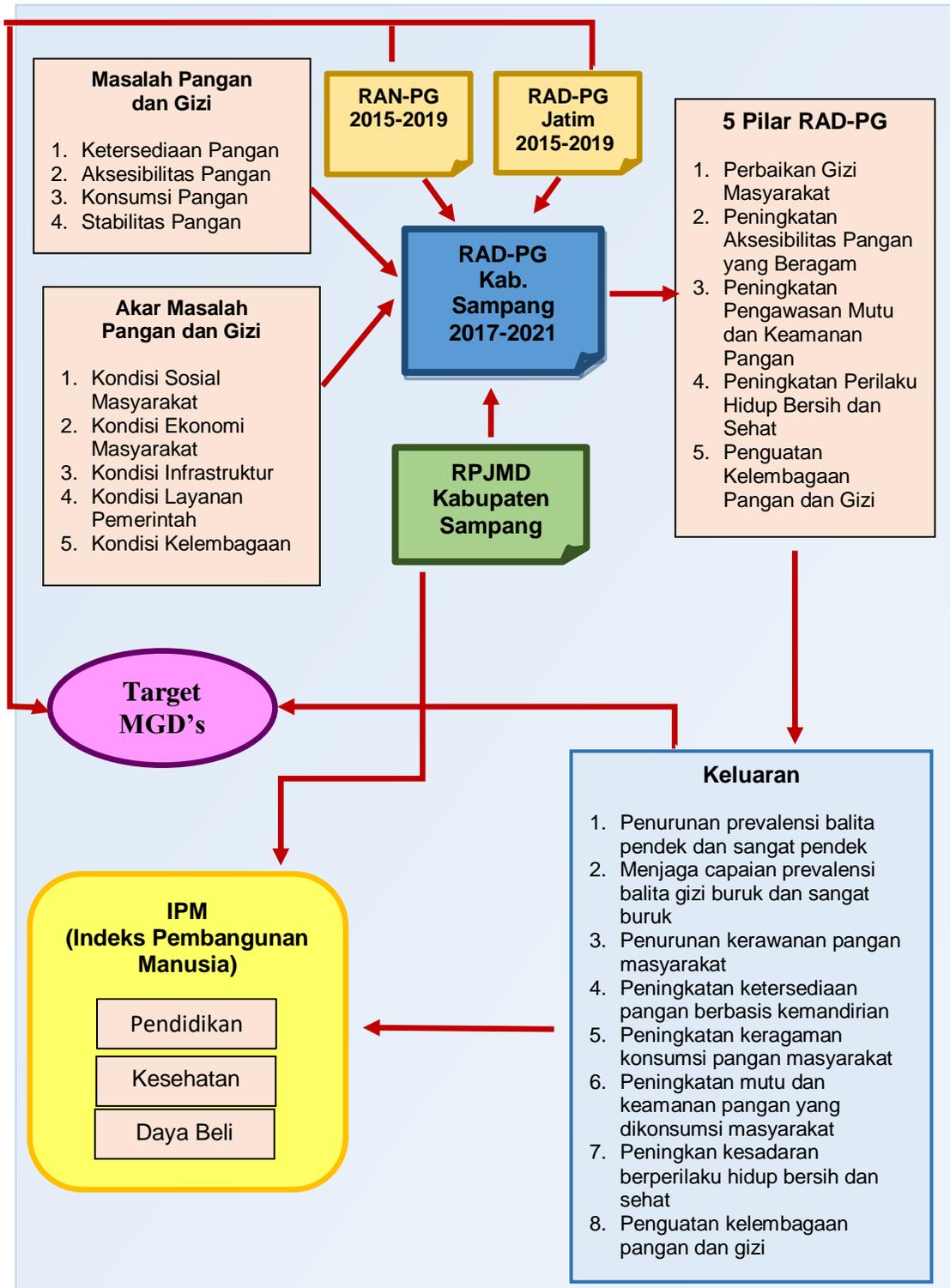
### **Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Pangan dan Gizi**

Penyusunan RAD-PG Kabupaten Sampang Tahun 2017-2021, mengacu pada keluaran akses universal pangan dan gizi pada tahun 2015, yakni: penurunan prevalensi gizi kurang anak balita dan penurunan prevalensi pendek anak balita, dan pencapaian konsumsi pangan dengan asupan kalori 2.000 kkal/kapita/hari. Pencapaian harus dilakukan secara bertahap dan indikator keluaran yang terukur. Secara garis besar kerangka umum konsep implementasi RAD-PG 2017-2021 Kabupaten Sampang disajikan dalam Gambar 2.

### **Arah Kebijakan dan Strategi Ketahanan Pangan**

Urusan ketahanan pangan sejak tahun 2009 dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian Kabupaten Sampang yang merupakan peningkatan organisasi dari Kantor Bimas dan Ketahanan Pangan dengan Sasaran “Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat (Renstra 2008-2013)” dan “Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, penganeekaragaman dan keamanan pangan (Renstra 2013-2018)”.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)



Gambar 2.

## Kerangka Konsep Implementasi RAD-PD Kabupaten Sampang

### Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Sampang

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tahun 2017-2021 di Kabupaten Sampang berdasarkan kegiatan dan institusi pelaksana kegiatan yang terstruktur secara integratif diwujudkan dalam 5 (lima) pilar rencana aksi.

- 1) Perbaikan Gizi Masyarakat, meliputi: pencegahan dan penanganan balita pendek dan sangat pendek, pencegahan dan penanganan gizi buruk dan kurang pada balita, penurunan jumlah BBLR, peningkatan layanan kelembagaan penanganan gizi, dan pengembangan edukasi/penyuluhan gizi pada masyarakat.
- 2) Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam, meliputi: peningkatan ketersediaan pangan, pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, percepatan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat, peningkatan produksi tanaman pangan, penguatan lumbung pangan di setiap kecamatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pasar desa
- 3) Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, meliputi: peningkatan inspeksi dan sertifikasi makanan, peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh dan pengawas keamanan pangan, pembinaan industri rumah tangga pangan tentang mutu dan keamanan makanan, penerapan *Good Manufacturing Product (GMP)*, peningkatan sistem bimbingan teknis dan monitoring pada kantin sekolah, dan peningkatan standar mutu pangan segar.
- 4) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meliputi: pembinaan PHBS di tingkat rumah tangga, PKK, dan sekolah, advokasi kebijakan operasional di tingkat Kabupaten, Sosialisasi dan promosi PHBS, pengembangan sarana dan prasaran PHBS, dan pengembangan pengelolaan air, baik air bersih maupun air limbah
- 5) Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi, meliputi: revitalisasi kelembagaan DKP, dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas SKPD, pengembangan sistem pendataan dan informasi pangan berbasis teknologi informasi, pembentukan dan penguatan kelembagaan pangan dan gizi sampai tingkat pedesaan, dan pengembangan inovasi ketahanan pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal.

### Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dalam rangka menjamin pencapaian RAD-PG yang dirasakan pada bagian ini adalah Pemantauan dan Evaluasi Internal dengan tujuan:

- 1) Memberikan masukan terhadap pelaksana kegiatan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan;
- 2) Menyediakan sumber informasi tentang pelaksanaan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi;
- 3) Sebagai salah satu dasar dalam perumusan kebijakan di bidang pangan dan gizi di Kabupaten Sampang.

Perlu dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG Kabupaten Sampang yang ditunjuk oleh Bupati Sampang melalui Surat Keputusan, dengan rancangan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : **Bupati Sampang**  
Ketua : **Kepala Bappeda Kabupaten Sampang**

Anggota :

- 1) **Dinas Kesehatan** (Koord. Pokja I Perbaikan Gizi Masyarakat);
- 2) **BKP4** (Koord. Pokja II Aksesibilitas Pangan yang Beragam);
- 3) **Dinas Kesehatan** (Koord. Pokja III Mutu dan Keamanan Pangan);
- 4) **Dinas Kesehatan** (Koord. Pokja IV Perilaku Hidup Bersih dan Sehat);
- 5) **Bappeda** (Koord. Pokja V Kelembagaan Pangan dan Gizi).

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD-PG dilakukan dengan menggunakan indikator berbasiskan pada pencapaian target yang mendasarkan pada 5 (lima) pilar RAD-PG. Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala, dengan memperhatikan indikator input, proses, output, serta indikator dampak.

Pada akhir pelaksanaan RAD-PG yakni tahun 2021 dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pencapaian seluruh indikator, sedangkan pada tahun 2019 dilakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap target MDG's.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

1. Ringkasan kondisi umum capaian pembangunan pangan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:
  - a. Ketersediaan pangan nabati 3 (tiga) yang tertinggi adalah: padi, ubi kayu, dan jagung.
  - b. Ketersediaan pangan hewani meliputi: ikan, daging, dan telur.
  - c. Tingkat konsumsi energi penduduk Kabupaten Sampang tahun 2015 sebesar 1.878 kkal/kapita/hari, masih di bawah standar Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 kkal/kapita/hari.
  - d. Tingkat konsumsi protein penduduk Kabupaten Sampang tahun 2015 sebesar 50,8 gram/kapita/hari, masih di bawah standar kecukupan konsumsi protein yang dianjurkan yaitu sebesar 52 gram/kapita/hari.
  - e. Persentase penduduk rawan pangan di Kabupaten Sampang masih tinggi, pada tahun 2013 jumlah penduduk rawan pangan sebesar 50,19% dan jumlah penduduk sangat rawan pangan sebesar 11,98%.
  - f. Skor PPH Kabupaten Sampang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 cenderung mengalami kenaikan yaitu berturut-turut sebesar 66,1; 72,9; 79,6; dan 86,4. Namun demikian, angka capaian skor PPH tersebut masih di bawah target MDG's yaitu sebesar 95.
2. Ringkasan kondisi umum capaian pembangunan gizi Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

- a. Status gizi berdasarkan tinggi badan sangat pendek dan pendek pada tahun 2014 sebesar 34,5%, masih di atas target MDGs sebesar 32%
- b. Status gizi berdasarkan berat badan sangat kurang dan kurang (balita gizi buruk dan gizi kurang) pada tahun 2014 sebesar 14,6%, di bawah target MDG's sebesar 15,5%.
3. Kecamatan dengan persentase jumlah rumah tangga ber-PHBS 3 (tiga) tertinggi yaitu Kecamatan Torjun, Kedundung, dan Robatal.
4. Kelembagaan pangan dan gizi di Kabupaten Sampang belum berjalan secara optimal.
5. Prioritas lokasi sasaran rencana aksi peningkatan capaian pangan dan gizi Kabupaten Sampang belum dapat ditentukan dikarenakan ketersediaan data yang belum terinci untuk setiap kecamatan.
6. RAD Pangan dan Gizi Kabupaten Sampang disusun berdasarkan 5 (lima) pilar pembangunan pangan dan gizi, yaitu:
  - a. Perbaikan Gizi Masyarakat
  - b. Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam
  - c. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
  - d. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
  - e. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi

### Rekomendasi

1. Untuk dapat melakukan analisis kondisi/capaian pembangunan pangan dan gizi sehingga diperoleh hasil pemetaan dan penetapan lokasi sasaran dengan tepat, maka pemenuhan data dan informasi terkait pada seluruh kecamatan menjadi suatu keniscayaan dan senantiasa *ter-up date*.
2. Penguatan lumbung desa, serta peningkatan sarana dan prasarana pasar desa
3. Pentingnya peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, baik di tingkat rumah tangga, sekolah, maupun industri pangan.
4. Pentingnya pembinaan kesadaran masyarakat untuk ber-PHBS yang berkelanjutan, serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana PHBS dan pengelolaan air.
5. Pentingnya penguatan kelembagaan pangan dan gizi di tingkat kabupaten sampai tingkat desa.
6. Penggunaan dan penerapan teknologi informasi terkait penyediaan data dan informasi untuk mendukung keberhasilan RAD-PG.

Semangat koordinasi dan integrasi serta sinergitas antar kegiatan, demikian juga kemitraan antar Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta merupakan salah satu faktor kunci dalam suksesnya capaian pembangunan ketahanan pangan dan gizi.

### DAFTAR PUSTAKA

*Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tahun 2016 (Nugrahini  
Susantinah Wisnujati)*

*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang dipublikasi Badan Ketahanan  
Pangan Provinsi Jawa Timur bersama World Food Program (WFP)  
Tahun 2015,*

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian Kabupaten Sampang  
yang merupakan peningkatan organisasi dari Kantor Bimas dan Ketahanan Pangan  
dengan Sasaran, 2008-2013 “Meningkatnya ketersediaan pangan utama  
masyarakat (Renstra dan Renstra 2013-2018 ‘Meningkatnya  
ketersediaan, aksesibilitas, panganekaragaman dan keamanan pangan.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016**

Kegiatan	Indikator	Ukuran	Tahun Dasar	Target					Alokasi Anggaran					Sumber Dana	Pelaksana
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>PILAR I. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</b>															
Peningkatan kesehatan bayi dan balita	1. Persentase balita ditimbang berat badannya D/S	%	91	93	95	97	99	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	2. Berat Badan Bayi Lahir Rendah	%	4,37	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	3. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	4. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	60,46	65	70	75	80	85	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	5. Cakupan Imunisasi Campak Bayi	%	91,74	94	96	98	100	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	6. Imunisasi dasar lengkap pada Bayi	%	89,72	92	94	96	98	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	7. Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	%	97,73	100	100	100	100	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	8. Desa/kelurahan UCI (Univerzal Child Immunization)	%	76,88	80	85	90	95	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	9. Anak Balita Mendapat Vitamin A	%	68,56	70	75	80	85	90	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	10. Persentase Baduta ditimbang	%	78,81	80	85	90	95	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	11. Baduta berat badan di bawah garis merah (BGM)	%	0	0	0	0	0	0	0	√	√	√	√	√	APBD
	12. Pelayanan kesehatan anak balita	%	72,40	75	80	85	90	95	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	13. Balita ditimbang (D/S)	%	76,29	80	85	90	95	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	14. Balita berat badan di bawah garis merah	%	1,55	1,25	1,00	0,75	0,50	0,25	√	√	√	√	√	APBD	Dinas

## Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

Kegiatan	Indikator	Ukuran	Tahun Dasar	Target					Alokasi Anggaran					Sumber Dana	Pelaksana
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	(BGM)														Kesehatan
	15. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
Peningkatan kesehatan ibu	1. Kunjungan ibu hamil (K1)	%	99	100	100	100	100	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	2. Kunjungan ibu hamil (K4)	%	76,42	80	85	90	95	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	3. Persentase ibu hamil mendapat Fe	%	76,34	80	85	90	95	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	4. Ibu hamil dengan imunisasi TT2	%	74,2	80	85	90	95	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	5. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC (Ante Natal Care) berkualitas	%	89,14	95	95	100	100	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
Imunisasi bagi anak-anak	1. Jumlah kegiatan fasilitasi imunisasi dilakukan	%	100	100	100	100	100	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
Peningkatan kesehatan tingkat rumah tangga	1. Persentase rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium	%	n/a	20	40	60	80	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	2. Persentase kecamatan yang melaksanakan surveilans gizi	kec	0	2	4	6	8	10	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	3. Persentase Desa Siaga (Desi)	%	100	100	100	100	100	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
Peningkatan kesehatan masyarakat	1. Persentase rumah tangga sehat	%	24,03	30	35	40	45	50	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	2. Taman posyandu yang difasilitasi	Buah	10	12	14	16	18	20	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	3. Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama	%	10,75	15	20	25	30	35	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	4. Rumah tangga ber- PHBS	%	29,82	30	35	40	45	50	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan

## Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

Kegiatan	Indikator	Ukuran	Tahun Dasar	Target					Alokasi Anggaran					Sumber Dana	Pelaksana
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	5. Jumlah Posyandu	buah	1.006	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	6. Posyandu aktif	%	72,27	75	80	85	90	95	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	7. Posyandu Purnama-Mandiri (Puri)	%	72,27	75	80	85	90	95	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	8. Jumlah Polkedes	buah	117	119	121	123	125	127	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	9. Jumlah Polindes	Buah	230	235	240	245	250	255	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	10. Jumlah posbindu aktif	buah	2	3	4	5	6	7	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
Peningkatan pelayanan kelembagaan penanganan gizi	1. Persentase puskesmas dengan tenaga terlatih tata laksana anak gizi Buruk	%	71,43	75	80	85	90	95	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	2. Jumlah tenaga terlatih tata laksana gizi di RSUD	Orang	6	7	7	8	8	9	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	3. Persentase balita ditimbang di Posyandu (D/S)	%	100	100	100	100	100	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	4. Persentase pembinaan kader di posyandu	%	n/a	20	40	60	80	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	5. Persentase Puskesmas memiliki konselor menyusui	%	n/a	20	40	60	80	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	6. Persentase puskesmas membina kelompok pendukung ASI	%	n/a	20	40	60	80	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
Peningkatan gizi dan pangan anak usia dini	1. Persentase peserta didik PAUD yang mendapat pemberian makanan tambahan	%	n/a	20	40	60	80	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Pendidikan
	2. Persentase Tenaga Pendidik PAUD yang dilatih tentang pangan gizi	%	n/a	20	40	60	80	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Pendidikan
<b>PILAR II. PENINGKATAN AKSESIBILITAS PANGAN YANG BERAGAM</b>															
Pemasaran produk pertanian	Jumlah kecamatan yang melaksanakan	Kec.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Distan

## Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

Kegiatan	Indikator	Ukuran	Tahun Dasar	Target					Alokasi Anggaran					Sumber Dana	Pelaksana
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pengembangan pasar, pemantauan, dan stabilisasi harga														
Peningkatan produksi pangan	1. Peningkatan produksi padi	Ton	246.369	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Distan
	2. Peningkatan produksi jagung	Ton	158.294	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Distan
	3. Peningkatan produksi ubi kayu	Ton	158.173	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Distan
	4. Peningkatan produksi kacang tanah	Ton	24.550	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Distan
	5. Peningkatan produksi kedelai	Ton	41.290	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Distan
	6. Peningkatan produksi sayur	Ton	51.725	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Distan
	7. Peningkatan produksi buah	Ton	29.617	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Distan
Peningkatan perikanan tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Ton	10.642,2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	DKPP
Peningkatan perikanan budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Ton	3.103,74	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	DKPP
Peningkatan produksi ternak	1. Peningkatan produksi daging	Ton	3.011,33	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	DKPP
	2. Peningkatan produksi telur	Ton	1.060,37	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	DKPP
Peningkatan produksi perkebunan	1. Peningkatan produksi Tembakau	Ton	2.895,5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Distan
	2. Peningkatan produksi jambu mete	Ton	2.456,4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Distan
	3. Peningkatan produksi Kelapa	Ton	873,75	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Distan
	4. Peningkatan produksi cabe jamu	Ton	817,8	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Distan
Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1. Jumlah kelompok tani terlibat pemberdayaan	Kelompok	1.083	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	2. Jumlah tenaga penyuluh pertanian	Orang	89	91	93	95	97	99	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Peningkatan kapasitas SDM peternakan	1. Jumlah kelompok peternak	Kelompok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	DKPP
	2. Jumlah gabungan kelompok peternak	Kelompok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	DKPP
Pengembangan ketersediaan pangan	1. Jumlah desa mandiri yg dikembangkan	Desa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	2. Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan di daerah rawan pangan	Buah	35	37	39	41	43	45	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	3. Jumlah penduduk rawan pangan dan sangat	%	62,17	55	50	45	40	35	√	√	√	√	√	APBD	BKP4

## Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

Kegiatan	Indikator	Ukuran	Tahun Dasar	Target					Alokasi Anggaran					Sumber Dana	Pelaksana
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	rawan pangan														
	4. Kecamatan rawan pangan	Buah	14	11	8	5	2	0	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	5. Ketersediaan data desa rawan pangan	%	100	100	100	100	100	100	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	6. Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	%	n/a	10	20	30	40	50	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	7. Cadangan Pangan di pekarangan penduduk	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan.	1. Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan	%	100	100	100	100	100	100	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	2. Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan	%	0	10	20	30	40	50	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat	1. Jumlah desa P2KP (Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan)	Desa	27	32	42	56	70	84	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	2. Jumlah kecamatan yang melaksanakan promosi penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Kec	14	14	14	14	14	14	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	3. Penyediaan tenaga/petugas lapangan seperti penyuluh (pendamping P2KP)	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	4. Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan	%	0	10	20	30	40	50	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	5. Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi penganeekaragaman dan keamanan pangan di seluruh kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Pengembangan kelembagaan distribusi	1. Jumlah gapoktan difasilitasi	Gapoktan	186	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Penguatan lumbung pangan	1. Jumlah lumbung pangan	Buah	35	36	37	38	39	40	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	2. Jumlah cadangan pangan pemerintah	Ton	100	110	120	130	140	150	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Penanganan daerah rawan pangan	1. Jumlah Desa Mandiri Pangan	Desa	5	6	7	8	9	10	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	2. Jumlah kawasan Rumah Pangan Lestari	Buah	19	20	21	22	23	24	√	√	√	√	√	APBD	BKP4

## Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

Kegiatan	Indikator	Ukuran	Tahun Dasar	Target					Alokasi Anggaran					Sumber Dana	Pelaksana
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	(P2KP)														
	3. Jumlah desa Karangkitri	Buah	18	19	20	21	22	23	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	4. Jumlah Daerah rawan pangan yang ditangani	Buah	122	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Pengembangan ekonomi wilayah lahan kering	Jumlah kelompok Usaha Pangan lahan Kering	Kelompok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Peningkatan kesadaran makanan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman	Jumlah promosi/kampanye konsumsi B2SA	Buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Peningkatan kualitas makanan di kantin sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang difasilitasi P2KP	Buah	17	18	19	20	21	22	√	√	√	√	√	APBD	BKP4 Dinas Pendidikan
Percepatan penganeekaragaman pangan	Jumlah kelompok/PKK yang diberdayakan	Kec	14	14	14	14	14	14	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Peningkatan promosi dan pemasaran pangan	Frekuensi pameran, publikasi dan sosialisasi pangan	Per Tahun	4x	4x	4x	4x	4x	4x	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Pengembangan pasar desa	Pengembangan sarana dan prasarana pasar desa	Buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
<b>PILAR III. PENINGKATAN PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN</b>															
Standarisasi kualitas bahan baku	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas IKM	IKM	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Disperindag
Pengembangan standarisasi dan HKI industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pemahaman dan penerapan standarisasi	IKM	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Disperindag
Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Sertifikat kesehatan ( <i>Health Certificate</i> )	Buah	0	1	2	3	4	5	√	√	√	√	√	APBD	DKPP
	2. Volume produk pengolahan hasil perikanan	Ton	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	DKPP
Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan Inspeksi dan Sertifikasi Makanan	1. Jumlah kecamatan yang disampling	Kec	1	2	3	4	5	6	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	2. Jumlah sarana produksi makanan MD yang memenuhi standar GMP yang terkini	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	3. Jumlah sarana penjualan makanan yang memenuhi standart ( <i>good retail practices</i> ) GRP/GDP ( <i>Good Distribution Practices</i> )	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD

## Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

Kegiatan	Indikator	Ukuran	Tahun Dasar	Target					Alokasi Anggaran					Sumber Dana	Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh keamanan pangan (PKP) dan pengawas pangan	1. Jumlah Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan pengawas pangan yang dilatih	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	BKP4	
	2. Jumlah tenaga penyuluh keamanan pangan segar	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	BKP4	
	3. Jumlah penyusunan modul Penerapan Prinsip-prinsip Keamanan Pangan pada Proses Produksi di IRTP berdasarkan jenis produksinya	Buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	4. Jumlah IRTP yang dilatih dan difasilitasi Penerapan Prinsip-prinsip Keamanan Pangan pada Proses Produksi di IRTP berdasarkan jenis produksinya	Buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Bimbingan Teknis pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1. Jumlah IRTP yang dilatih dan difasilitasi, dan Implementasi cara produksi produk pangan yang baik (CPPB) pada Industri Rumah Tangga	Buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Disperindag	
	2. Jumlah IRTP di monitoring, dan diverifikasi penerapan CPPB pada industri rumah tangga	Buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Disperindag	
Pembinaan Kantin Sekolah	1. Jumlah kantin sekolah yang dilatih dan difasilitasi penerapan prinsip-2 Keamanan Pangan di Kantin Sekolah	Kantin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	
	2. Jumlah kantin sekolah yang dimonitori dan diverifikasi pelaksanaan Bimtek	Kantin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	
Menurunkan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang tidak memenuhi syarat	Jumlah PJAS diuji melalui operasional mobil laboratorium keliling	Jumlah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan, BKP4	
Menurunkan Prosentase pangan yang tidak memenuhi syarat	Jumlah sampling dan uji pangan untuk penanganan Keamanan, mutu dan gizi pangan	Unit Sampel	71	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan, BKP4	

## Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

Kegiatan	Indikator	Ukuran	Tahun Dasar	Target					Alokasi Anggaran					Sumber Dana	Pelaksana
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dibina dalam memproduksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan, Deperindag
Meningkatkan ketersediaan obat dan produk pangan sehat	Persentase produk obat dan pangan yang memenuhi syarat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
Peningkatan Standar Mutu Produk Pangan Segar	Jumlah unit sertifikat pangan segar (prima, GHP/GMP)	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Pertanian
<b>PILAR IV. PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT</b>															
Layanan penanganan sampah di perkotaan	Capaian layanan persampahan perkotaan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
Pengembangan sarana/prasarana hidup bersih dan sehat	1. Persentase akses masyarakat memiliki akses terhadap jamban sehat	%	35	40	45	50	55	60	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	2. Persentase akses masyarakat memiliki akses terhadap sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan	%	60	65	70	75	80	85	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
Pengembang program kecamatan sehat	Jumlah kecamatan telah melakukan minimal 4 tatanan kecamatan sehat	Kec	n/a	2	5	8	11	14	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
Monitoring kesehatan masyarakat	1. Persentase Sarana Air Minum yang memenuhi syarat kesehatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	2. Meningkatkan terbentuknya Forum Kecamatan Sehat di Kabupaten	Kec.	n/a	2	5	8	11	14	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persentase desa STBM	%	1,08	2	3	4	5	6	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
Pengembangan Pengelolaan Air	1. Persentase capaian layanan air minum perkotaan	%	100	100	100	100	100	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas PU CKTR
	2. Persentase capaian layanan air minum perdesaan	%	60	65	70	75	80	85	√	√	√	√	√	APBD	Dinas PU CKTR
	3. Persentase capaian layanan air limbah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas PU CKTR

## Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

Kegiatan	Indikator	Ukuran	Tahun Dasar	Target					Alokasi Anggaran					Sumber Dana	Pelaksana
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	4. Persentase capaian layanan air limbah perdesaan	%	25	30	35	40	45	50	√	√	√	√	√	APBD	Dinas PU CKTR
Tingkat pendidikan masyarakat	1. Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD sederajat	Rasio	94,44	100	100	100	100	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Pendidikan
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SMP sederajat	Rasio	77,21	80	85	90	95	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Pendidikan
	3. Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SMA sederajat	Rasio	41,46	45	50	55	60	65	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH) pada usia 15 s/d 59 tahun	Rasio	91,72	94	96	98	100	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Pendidikan
Pembinaan PHBS pangan dan Gizi	1. Persentase sekolah dasar yang mendapat sosialisasi PHBS	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Pendidikan
	2. Jumlah PKK tingkat kecamatan/desa yg telah dilatih sbg Kelompok Pembina PHBS	Kec	n/a	2	5	8	11	14	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	3. Jumlah tenaga penyuluh PHBS pada tingkat kecamatan/desa	Orang	n/a	1	1	2	2	3	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Pengembangan kebijakan sehat bidang pangan dan gizi	1. Jumlah Kecamatan yang diadvokasi untuk menetapkan kebijakan yang berwawasan kesehatan	Kec.	n/a	2	5	8	11	14	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	2. Monitoring dan evaluasi PHBS level kecamatan/desa	Kec.	n/a	2	5	8	11	14	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Sosialisasi dan promosi PHBS	1. Jumlah Kecamatan/desa yang memasang reklame PHBS	Kec.	n/a	2	5	8	11	14	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	2. Lomba PHBS desa tingkat Kabupaten	Frekuensi/ Tahun	n/a	1x	1x	1x	1x	1x	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	3. Frekuensi promosi PHBS di media warga	Jumlah/ tahun	n/a	1x	1x	2x	2x	2x	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
<b>PILAR V. PENGUATAN KELEMBAGAAN PANGAN DAN GIZI</b>															
Peningkatan koordinasi melalui pertemuan DKP dalam setahun	Frekuensi pertemuan Dewan Ketahanan Pangan dalam setahun	Kali/tahun	0	1	1	2	2	3	√	√	√	√	√	APBD	Bappeda, BKP4

## Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

Kegiatan	Indikator	Ukuran	Tahun Dasar	Target					Alokasi Anggaran					Sumber Dana	Pelaksana
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pemberdayaan penyuluh pertanian/perikanan/kehutanan	Jumlah penyuluh bersertifikat	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Peningkatan pembinaan Tim Pangan Kecamatan	Jumlah Tim Pangan Kecamatan yang dibina	Kec	0	1	2	3	4	5	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Peningkatan pembinaan Tim Pangan Perdesaan	Jumlah Tim Pangan Desa yang dibina	Desa	0	5	10	15	20	25	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Peningkatan pembinaan tim SKPG	1. Jumlah SKPG kecamatan/desa yang dibina	Kec.	0	1	2	3	4	5	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
	2. Jumlah kecamatan/desa yang diadvokasi untuk menetapkan Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan	Kec.	0	1	2	3	4	5	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
Peningkatan jejaring keamanan pangan daerah	Jumlah kecamatan/desa yang memiliki Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD)	Kec.	0	1	2	3	4	5	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
Koordinasi dan fasilitasi Peningkatan Akseibilitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi	Jumlah rapat Koordinasi Lintas Sektor	Kali/Tahun	0	1	1	2	2	3	√	√	√	√	√	APBD	Bappeda
Koordinasi dan fasilitasi peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah rapat Koordinasi dan fasilitasi peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan	Kali/Tahun	0	1	1	2	2	3	√	√	√	√	√	APBD	Bappeda
Peningkatan kelembagaan pangan dan gizi di perdesaan	1. Pembentukan/Penguatan Tim Pangan dan Gizi Kecamatan	Kec	0	1	2	3	4	5	√	√	√	√	√	APBD	Bappeda
	2. Pembentukan kelembagaan pangan dan gizi di perdesaan	Desa	0	5	10	15	20	25	√	√	√	√	√	APBD	Bappeda
Revitalisasi Institusi Ketahanan Pangan dan Gizi	1. Pemberdayaan DKP	Kali/tahun	n/a	1	1	2	2	3	√	√	√	√	√	APBD	Bappeda
	2. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten	Kali/tahun	n/a	1	1	2	2	3	√	√	√	√	√	APBD	Bappeda
	3. Penguatan kapasitas tenaga Pembina	Kali/tahun	n/a	1	1	2	2	3	√	√	√	√	√	APBD	Bappeda
Peningkatan Sistem Informasi pangan dan Gizi	1. Pendataan gizi balita	%	n/a	20	40	60	80	100	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Kesehatan
	2. Pendataan PPH	%	n/a	20	40	60	80	100	√	√	√	√	√	APBD	BKP4

## Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

Kegiatan	Indikator	Ukuran	Tahun Dasar	Target					Alokasi Anggaran					Sumber Dana	Pelaksana
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	3. Pendataan kerawanan pangan	%	n/a	20	40	60	80	100	√	√	√	√	√	APBD	BKP4
Koordinasi dan kerjasama lintas SKPD	Pembinaan Pokja RAD-PG	Kali/tahun	n/a	1	1	2	2	3	√	√	√	√	√	APBD	Bappeda